BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.690, 2015 KEMENDAGRI. Urusan Pemerintahan. Tahun 2015. Penugasan. Pelimpahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN
DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa dengan adanya penetapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan nomenklatur Program lingkup Kementerian Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

www.peraturan.go.id

Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

www.peraturan.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

www.peraturan.go.id

13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat , meliputi:
   a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;
   b. Program Bina Pembangunan Daerah;
   c. Program Bina Pemerintahan Desa;
   d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
   e. Program Penataaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Pasal 9

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;

b. Program Bina Pembangunan Daerah; dan

c. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

4. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Menteri menetapkan KPA pelaksana kegiatan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri.

(2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan gubernur dan bupati/walikota yang menerima penugasan.

(3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

(4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

5. Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (ayat), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) KPA kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. menetapkan PPK;

b. menetapkan PPSPM;

c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;

d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;

www.peraturan.go.id

g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;

h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

k. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

(2) Menteri mendelegasikan penetapan Bendahara Pengeluaran kepada kepala Satuan Kerja.

6. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dihapus

Pasal 23

Dihapus

Pasal 24

Dihapus

7. Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri.

(2) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015,

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2
TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI
TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 4,852,808,000	Rp 57,281,874,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 728,000,000	Rp 728,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 288,414,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 133,920,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 436,950,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 109,934,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 49,002,500,000
	d. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 915,590,000	Rp 782,990,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 223,316,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,000,000,000	Rp 904,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 600,000,000	Rp 534,588,000
	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,106,480,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 4,186,341,000	Rp 59,992,787,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 273,900,000	Rp 273,900,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 652,000,000	Rp 652,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 153,000,000	Rp 153,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 268,956,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 170,270,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 610,670,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 99,980,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 41,809,700,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 822,565,000	Rp 699,445,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 800,000,000	Rp 710,365,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 15,694,377,000
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 4,960,036,000	Rp 17,192,764,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 229,100,000	Rp 229,100,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 637,000,000	Rp 637,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 460,000,000	Rp 460,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 261,322,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 109,760,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 363,230,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 96,606,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 7,692,500,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 853,018,000	Rp 695,374,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 250,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 450,000,000	Rp 399,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 400,000,000	Rp 356,224,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 6,173,566,000
4.	PROVINSI RIAU	Rp 5,264,436,000	Rp 22,310,443,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 640,000,000	Rp 640,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 254,672,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 89,755,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 247,730,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 474,490,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 95,122,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 12,844,100,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 852,667,000	Rp 690,667,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	Rp 379,840,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 650,000,000	Rp 577,533,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan dan PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG dan RI-RDTL	Rp 450,000,000	Rp 420,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 355,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 275,000,000	Rp 245,135,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,958,168,000
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 4,906,650,000	Rp 7,776,684,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 678,000,000	Rp 678,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 293,322,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 73,180,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 165,970,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 438,340,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 104,088,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 2,735,300,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 858,750,000	Rp 714,678,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 450,000,000	Rp 434,500,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 500,000,000	Rp 475,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 700,000,000	Rp 623,644,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 1,915,562,000
6	PROVINSI JAMBI	Rp 4,905,933,000	Rp 18,849,166,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 643,000,000	Rp 643,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 262,102,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 82,440,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 223,260,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 97,180,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 11,288,900,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 727,951,000	Rp 636,591,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 450,000,000	Rp 429,977,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 250,011,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 950,000,000	Rp 859,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 525,000,000	Rp 467,775,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 4,073,912,000
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp 9,648,359,000	Rp 34,397,224,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 647,000,000	Rp 647,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 287,922,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,300,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 301,158,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,912,032,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 102,476,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 22,078,100,000
	d. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 772,471,000	Rp 654,583,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 223,316,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,100,000,000	Rp 904,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 733,000,000	Rp 652,990,000
	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 9,237,235,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp 3,658,802,000	Rp 6,956,424,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 662,000,000	Rp 662,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 284,590,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 69,680,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 164,590,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 462,440,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 100,948,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 2,929,700,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 814,554,000	Rp 686,154,000
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,078,570,000
9	PROVINSI BENGKULU	Rp 3,911,396,000	Rp 15,968,018,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	Rp 670,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 285,218,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 78,725,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 217,428,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 110,442,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 10,802,900,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 914,583,000	Rp 770,763,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 223,316,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	Rp 222,850,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,478,189,000
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp 4,897,170,000	Rp 29,344,851,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 642,000,000	Rp 642,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 295,442,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,300,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 276,038,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 103,162,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 19,259,300,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,038,228,000	Rp 850,068,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,200,000,000	Rp 1,064,583,000
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 400,000,000	Rp 356,224,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 6,772,676,000
11.	PROVINSI BANTEN	Rp 3,898,538,000	Rp 22,939,386,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 695,000,000	Rp 695,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 307,788,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 71,295,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 175,874,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 102,652,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 10,219,700,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 725,929,000	Rp 584,065,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	Rp 147,873,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 325,000,000	Rp 289,705,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 10,153,043,000
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp 712,414,000	Rp 7,675,013,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 80,000,000	Rp -
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 632,414,000	Rp 537,077,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 7,137,936,000
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp 15,699,252,000	Rp 76,827,041,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 241,500,000	Rp 241,500,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 689,000,000	Rp 689,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 575,000,000	Rp 575,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 325,230,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 141,880,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 443,182,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 9,966,978,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 106,530,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 42,295,700,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 916,952,000	Rp 715,894,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 450,000,000	Rp 429,816,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 450,000,000	Rp 533,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 553,000,000	Rp 492,690,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 30,404,441,000
14	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 6,302,230,000	Rp 78,279,256,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 235,200,000	Rp 235,200,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 632,000,000	Rp 632,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	Rp 490,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 255,372,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 171,600,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 545,530,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 96,944,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 60,180,500,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 870,584,000	Rp 697,784,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 550,000,000	Rp 529,940,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 950,000,000	Rp 850,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 720,000,000	Rp 641,497,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 13,572,335,000
15	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp 5,202,967,000	Rp 8,726,726,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 698,000,000	Rp 698,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 470,000,000	Rp 470,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 288,837,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 60,150,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 123,480,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 467,340,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 96,854,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 3,707,300,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 808,306,000	Rp 701,650,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 350,000,000	Rp 329,874,000
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,000,000,000	Rp 860,000,000
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	Rp 222,640,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 1,537,262,000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 13,447,690,000	Rp 83,225,239,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 279,600,000	Rp 279,600,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 672,000,000	Rp 672,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 582,000,000	Rp 582,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 267,909,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 182,745,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 596,470,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 6,292,328,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 450,470,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 98,008,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 59,986,100,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 801,160,000	Rp 614,476,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 950,000,000	Rp 831,889,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 534,668,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 1,025,000,000	Rp 908,385,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 18,466,121,000
17.	PROVINSI BALI	Rp 5,099,465,000	Rp 12,838,250,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 846,000,000	Rp 846,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 427,270,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 75,010,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 220,718,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 135,396,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 5,457,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,000,071,000	Rp 814,071,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 450,000,000	Rp 390,110,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 925,000,000	Rp 823,999,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 3,831,870,000
18	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 14,316,375,000	Rp 23,662,616,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 212,800,000	Rp 212,800,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 285,342,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,785,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 290,790,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 9,498,003,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 200,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 99,026,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 15,274,400,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 824,629,000	Rp 644,465,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 250,000,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp 500,000,000	Rp 475,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 600,000,000	Rp 399,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 478,000,000	Rp 425,688,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,331,263,000
19	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp 13,890,621,000	Rp 20,688,149,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 205,900,000	Rp 205,900,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 707,000,000	Rp 707,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 277,100,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 104,785,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 293,110,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 8,170,246,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 100,758,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 11,678,000,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 761,722,000	Rp 691,834,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	Rp 379,720,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 750,000,000	Rp 666,088,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 900,000,000	Rp 860,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 875,000,000	Rp 779,240,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 4,720,367,000
20	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 3,881,937,000	Rp 22,392,752,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 201,800,000	Rp 201,800,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 709,000,000	Rp 709,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 338,885,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,770,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 266,090,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 570,880,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 115,574,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 14,885,600,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 709,938,000	Rp 589,038,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 250,000,000
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 231,000,000	Rp 205,720,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,551,594,000
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp 4,441,379,000	Rp 14,229,433,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 731,000,000	Rp 731,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 292,829,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 95,755,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 299,430,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 474,650,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 106,110,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 7,109,600,000
	d. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 654,105,000	Rp 565,545,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp 500,000,000	Rp -
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 532,500,000	Rp 474,475,000
	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,048,813,000
22	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 10,339,513,000	Rp 20,487,513,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 233,200,000	Rp 233,200,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 715,000,000	Rp 715,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 319,350,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 109,300,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 303,830,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,365,338,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 486,540,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 112,286,000	Rp -
	f) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 12,261,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,029,669,000	Rp 825,269,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 975,000,000	Rp 863,605,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 400,000,000	Rp 380,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 310,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 425,000,000	Rp 378,488,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 4,520,751,000
23	PROVINSI GORONTALO	Rp 8,198,667,000	Rp 10,795,041,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 690,000,000	Rp 690,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 360,000,000	Rp 360,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 335,120,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 65,665,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 152,670,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 3,857,744,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 118,888,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 5,748,800,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 828,580,000	Rp 713,820,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 275,000,000	Rp 243,724,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 305,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 550,000,000	Rp 490,060,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,043,637,000
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 5,575,964,000	Rp 20,907,880,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 218,600,000	Rp 218,600,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 677,000,000	Rp 677,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	Rp 175,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 276,008,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 89,755,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 226,150,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 493,770,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 102,874,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 14,788,400,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 846,807,000	Rp 731,307,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 625,000,000	Rp 553,664,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,050,000,000	Rp 941,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 275,000,000	Rp 245,135,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,577,774,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 7,852,485,000	Rp 9,951,574,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 666,000,000	Rp 666,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 185,000,000	Rp 185,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 254,194,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 65,665,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 127,750,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 3,455,815,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 96,038,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 5,068,400,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 982,023,000	Rp 866,238,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 223,316,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 280,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 750,000,000	Rp 668,172,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 1,794,448,000
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 5,301,321,000	Rp 21,791,445,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 212,000,000	Rp 212,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 689,000,000	Rp 689,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 225,000,000	Rp 225,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 277,636,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,770,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 248,270,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 101,176,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 14,788,400,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 884,469,000	Rp 729,047,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 700,000,000	Rp 605,217,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,050,000,000	Rp 904,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 267,420,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 3,371,361,000
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp 7,184,495,000	Rp 30,531,197,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 259,100,000	Rp 259,100,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 766,000,000	Rp 766,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 366,065,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 137,935,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 460,678,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 580,690,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 122,584,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 18,482,000,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,001,443,000	Rp 813,343,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,000,000,000	Rp 887,474,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 500,000,000	Rp 475,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 770,000,000	Rp 685,731,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 7,462,549,000
28	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 14,101,563,000	Rp 18,076,779,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 223,700,000	Rp 223,700,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 789,000,000	Rp 789,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 330,540,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 86,725,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 217,010,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 8,733,022,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 107,146,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 8,373,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,023,920,000	Rp 832,742,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	Rp 378,784,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 850,000,000	Rp 744,328,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 650,000,000	Rp 577,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 235,500,000	Rp 209,726,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 5,948,299,000
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 18,300,716,000	Rp 38,947,684,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 259,100,000	Rp 259,100,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 735,000,000	Rp 735,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 305,635,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 151,905,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 407,890,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 12,341,537,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 100,486,000	Rp -
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 23,536,400,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,004,163,000	Rp 810,827,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 600,000,000	Rp 522,941,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 700,000,000	Rp 504,461,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 900,000,000	Rp 815,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 450,000,000	Rp 400,752,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 11,363,203,000
30	PROVINSI MALUKU	Rp 9,484,326,000	Rp 16,233,494,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 232,700,000	Rp 232,700,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 731,000,000	Rp 731,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 300,232,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,440,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 235,174,000	Rp -
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,394,167,000	Rp -
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	Rp -
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 108,274,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 9,831,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 894,339,000	Rp 781,289,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 675,000,000	Rp 597,941,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 550,000,000	Rp 399,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 750,000,000	Rp 668,214,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,992,150,000
31	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp 5,281,719,000	Rp 15,207,355,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 234,300,000	Rp 234,300,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 654,000,000	Rp 654,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 271,160,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 91,725,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 198,950,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	Rp -
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 450,390,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 105,416,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 8,859,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,060,778,000	Rp 901,348,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 218,724,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 800,000,000	Rp 818,766,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 700,000,000	Rp 623,644,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,897,373,000
32	PROVINSI PAPUA	Rp 5,561,933,000	Rp 54,393,189,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 275,200,000	Rp 275,200,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 792,000,000	Rp 792,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 390,281,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 201,510,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 629,410,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 131,316,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 40,449,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 712,216,000	Rp 619,464,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 247,873,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 500,000,000	Rp 470,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 350,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 375,000,000	Rp 334,275,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 10,255,177,000
33	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 4,066,590,000	Rp 19,793,125,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	Rp -
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 272,300,000	Rp 272,300,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 751,000,000	Rp 751,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 329,278,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 113,270,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 230,750,000	Rp -

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 109,586,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 13,427,600,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 855,406,000	Rp 750,906,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 750,000,000	Rp 646,368,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 3,644,951,000
34	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 2,225,039,000	Rp 7,933,293,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 717,000,000	Rp 717,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 295,979,000	Rp -
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 64,150,000	Rp -
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 299,770,000	Rp -
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	Rp -
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp 106,140,000	Rp -
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa		
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp -	Rp 4,096,400,000
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 622,000,000	Rp 554,181,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp -	Rp 475,000,000
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,090,712,000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI
TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 2,120,000,000	Rp 29,393,289,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Subulussalam	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	- Kota Sabang	Rp -	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Pidie Jaya	Rp 720,000,000	Rp 720,000,000
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kota Subulussalam	Rp -	Rp 766,175,000
	- Kab. Aceh Barat Daya	Rp -	Rp 977,356,000
	- Kab. Pidie Jaya	Rp -	Rp 962,377,000
	- Kota Sabang	Rp -	Rp 653,595,000
	- Kab. Aceh Besar	Rp -	Rp 1,560,223,000
	- Kab. Pidie	Rp -	Rp 1,616,786,000
	- Kab. Aceh Utara	Rp -	Rp 1,849,697,000
	- Kab. Aceh Timur	Rp -	Rp 1,620,043,000
	- Kab. Aceh Selatan	Rp -	Rp 1,230,336,000
	- Kab. Aceh Barat	Rp -	Rp 1,050,400,000
	- Kab. Aceh Tengah	Rp -	Rp 1,115,503,000
	- Kab. Aceh Tenggara	Rp -	Rp 1,177,977,000
	- Kab. Simeulue	Rp -	Rp 942,016,000
	- Kab. Aceh Singkil	Rp -	Rp 1,010,840,000
	- Kab. Bireuen	Rp -	Rp 1,466,022,000
	- Kab. Gayo Lues	Rp -	Rp 970,957,000
	- Kab. Aceh Jaya	Rp -	Rp 914,729,000
	- Kab. Nagan Jaya	Rp -	Rp 1,013,357,000
	- Kab. Aceh Tamiang	Rp -	Rp 1,190,962,000
	- Kab. Bener Meriah	Rp -	Rp 1,015,374,000
	- Kota Banda Aceh	Rp -	Rp 952,593,000
	- Kota Langsa	Rp -	Rp 864,776,000
	- Kota Lhoksumawe	Rp -	Rp 851,195,000
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 2,150,000,000	Rp 46,930,376,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp -	Rp 1,431,014,000
	- Kab. Deli Serdang	Rp -	Rp 2,850,875,000
	- Kab. Karo	Rp -	Rp 1,424,111,000
	- Kab. Langkat	Rp -	Rp 2,182,417,000
	- Kab. Simalungun	Rp -	Rp 2,346,913,000
	- Kab. Labuan Batu	Rp -	Rp 1,273,470,000
	- Kab. Dairi	Rp -	Rp 1,236,622,000
	- Kab. Tapanuli Utara	Rp -	Rp 1,260,155,000
	- Kab. Tapanuli Selatan	Rp -	Rp 1,231,462,000
	- Kab. Asahan	Rp -	Rp 1,930,075,000
	- Kab. Nias	Rp -	Rp 1,110,723,000
	- Kab. Samosir	Rp -	Rp 944,875,000
	- Kab. Mandailing Natal	Rp -	Rp 1,627,831,000
	- Kab. Nias Selatan	Rp -	Rp 1,828,626,000
	- Kab. Pakpak Bharat	Rp -	Rp 825,726,000
	- Kab. Humbang Hasundutan	Rp -	Rp 1,026,082,000
	- Kab. Toba Samosir	Rp -	Rp 1,146,563,000
	- Kab. Serdang Bedagai	Rp -	Rp 1,643,699,000
	- Kab. Batu Bara	Rp -	Rp 1,111,995,000
	- Kab. Padang Lawas	Rp -	Rp 1,139,414,000
	- Kab. Padang Lawas Utara	Rp -	Rp 1,078,832,000
	- Kab. Labuan Batu Selatan	Rp -	Rp 1,030,109,000
	- Kab. Labuan Batu Utara	Rp -	Rp 1,172,329,000
	- Kab. Nias Utara	Rp -	Rp 1,127,400,000
	- Kab. Nias Barat	Rp -	Rp 995,208,000
	- Kota Medan	Rp -	Rp 3,498,741,000
	- Kota Tebing Tinggi	Rp -	Rp 836,883,000
	- Kota Binjai	Rp -	Rp 973,571,000
	- Kota Pematang Siantar	Rp -	Rp 1,023,542,000
	- Kota Tanjung Balai	Rp -	Rp 894,540,000
	- Kota Sibolga	Rp -	Rp 738,150,000
	- Kota Padang Sidempuan	Rp -	Rp 917,225,000
	- Kota Gunungsitoli	Rp -	Rp 921,198,000
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 5,195,000,000	Rp 25,689,041,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Pariaman	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Solok	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
	- Kab. Solok Selatan	Rp 240,000,000	Rp 240,000,000
	- Kab. Tanah Datar	Rp 425,000,000	Rp 425,000,000
	- Kab. Padang Pariaman	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 330,000,000	Rp 330,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Solok	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
	- Kab. Tanah Datar	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kota Pariaman	Rp -	Rp 760,397,000
	- Kab. Solok	Rp -	Rp 1,294,191,000
	- Kab. Solok Selatan	Rp -	Rp 919,798,000
	- Kab. Tanah Datar	Rp -	Rp 1,284,792,000
	- Kab. Padang Pariaman	Rp -	Rp 1,453,104,000
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp -	Rp 1,265,059,000
	- Kab. Agam	Rp -	Rp 1,488,727,000
	- Kab. Pasaman	Rp -	Rp 1,147,955,000
	- Kab. Pesisir Selatan	Rp -	Rp 1,423,593,000
	- Kab. Kepulauan Mentawai	Rp -	Rp 897,954,000
	- Kab. Dharmasraya	Rp -	Rp 1,069,428,000
	- Kab. Pasaman Barat	Rp -	Rp 1,274,065,000
	- Kab. Sawahlunto-Sinjunjung	Rp -	Rp 1,006,440,000
	- Kota Bukittinggi	Rp -	Rp 724,782,000
	- Kota Padang Panjang	Rp -	Rp 675,883,000
	- Kota Solok	Rp -	Rp 651,276,000
	- Kota Sawah Lunto	Rp -	Rp 697,252,000
	- Kota Padang	Rp -	Rp 1,635,028,000
	- Kota Payakumbuh	Rp -	Rp 824,317,000
4.	PROVINSI RIAU	Rp 2,700,000,000	Rp 19,271,111,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Rokan Hulu	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp -	Rp 998,302,000
	- Kab. Rokan Hulu	Rp -	Rp 1,490,030,000
	- Kab. Kampar	Rp -	Rp 1,734,616,000
	- Kab. Bengkalis	Rp -	Rp 1,303,097,000
	- Kab. Indragiri Hulu	Rp -	Rp 1,342,503,000
	- Kab. Indragiri Hilir	Rp -	Rp 1,682,767,000
	- Kab. Pelalawan	Rp -	Rp 1,236,978,000
	- Kab. Rokan Hilir	Rp -	Rp 1,577,521,000
	- Kab. Siak	Rp -	Rp 1,331,310,000
	- Kab. Kuantan Singingi	Rp -	Rp 1,273,961,000
	- Kota Pekanbaru	Rp -	Rp 1,633,574,000
	- Kota Dumai	Rp -	Rp 966,452,000
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 2,150,000,000	Rp 8,465,400,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Bintan	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
	- Kab. Kep. Anambas	Rp 1,000,000,000	Rp -
	- Kab. Karimun	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Bintan	Rp -	Rp 943,206,000
	- Kab. Kep. Anambas	Rp -	Rp 806,742,000
	- Kab. Karimun	Rp -	Rp 1,118,666,000
	- Kab. Natuna	Rp -	Rp 947,238,000
	- Kab. Lingga	Rp -	Rp 867,588,000
	- Kota Batam	Rp -	Rp 1,855,469,000
	- Kota Tanjung Pinang	Rp -	Rp 776,491,000
6.	PROVINSI JAMBI	Rp -	Rp 15,753,470,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Batang Hari	Rp -	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp -	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Batang Hari	Rp -	Rp 1,066,798,000
	- Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp -	Rp 1,164,929,000
	- Kab. Bungo	Rp -	Rp 1,250,314,000
	- Kab. Sorolangun	Rp -	Rp 1,082,247,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Kerinci	Rp -	Rp 1,188,598,000
	- Kab. Merangin	Rp -	Rp 1,478,821,000
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp -	Rp 1,052,229,000
	- Kab. Tebo	Rp -	Rp 1,184,229,000
	- Kab. Muaro Jambi	Rp -	Rp 1,190,307,000
	- Kota Jambi	Rp -	Rp 1,278,192,000
	- Kota Sungai Penuh	Rp -	Rp 816,806,000
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp -	Rp 24,611,976,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Musi Banyuasin	Rp -	Rp 1,468,236,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu	Rp -	Rp 1,167,893,000
	- Kab. Muara Enim	Rp -	Rp 1,607,821,000
	- Kab. Lahat	Rp -	Rp 1,478,918,000
	- Kab. Musi Rawas	Rp -	Rp 1,298,161,000
	- Kab. Ogan Komering Ilir	Rp -	Rp 1,715,609,000
	- Kab. Banyuasin	Rp -	Rp 1,822,702,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp -	Rp 1,671,898,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Rp -	Rp 1,426,700,000
	- Kab. Ogan Ilir	Rp -	Rp 1,376,872,000
	- Kab. Empat Lawang	Rp -	Rp 1,127,080,000
	- Kab. Panukal Abab Lematang Ilir	Rp -	Rp 1,734,467,000
	- Kab. Musi Rawas Utara	Rp -	Rp 1,695,903,000
	- Kota Palembang	Rp -	Rp 2,411,521,000
	- Kota Prabumulih	Rp -	Rp 883,406,000
	- Kota Pagar Alama	Rp -	Rp 807,952,000
	- Kota Lubuk Linggau	Rp -	Rp 916,837,000
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp -	Rp 6,255,064,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Belitung	Rp -	Rp 797,550,000
	- Kab. Bangka	Rp -	Rp 1,073,532,000
	- Kab. Bangka Barat	Rp -	Rp 893,180,000
	- Kab. Bangka Tengah	Rp -	Rp 878,638,000
	- Kab. Bangka Selatan	Rp -	Rp 926,300,000
	- Kab. Belitung Timur	Rp -	Rp 847,044,000
	- Kota Pangkal Pinang	Rp -	Rp 838,820,000
9.	PROVINSI BENGKULU	Rp 1,600,000,000	Rp 12,032,666,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Lebong	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Lebong	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
	- Kab. Lebong	Rp -	Rp 963,267,000
	- Kab. Bengkulu Utara	Rp -	Rp 1,242,349,000
	- Kab. Bengkulu Selatan	Rp -	Rp 953,550,000
	- Kab. Rejang Lebong	Rp -	Rp 1,163,064,000
	- Kab. Seluma	Rp -	Rp 1,114,747,000
	- Kab. Kaur	Rp -	Rp 1,057,217,000
	- Kab. Muko-Muko	Rp -	Rp 1,063,687,000
	- Kab. Kepahiang	Rp -	Rp 902,222,000
	- Kab. Bengkulu Tengah	Rp -	Rp 912,912,000
	- Kota Bengkulu	Rp -	Rp 1,059,651,000
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp 260,000,000	Rp 24,296,868,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Lampung Barat	Rp 260,000,000	Rp 260,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
	- Kab. Lampung Barat	Rp -	Rp 1,179,274,000
	- Kab. Lampung Selatan	Rp -	Rp 2,244,465,000
	- Kab. Lampung Tengah	Rp -	Rp 2,705,364,000
	- Kab. Lampung Utara	Rp -	Rp 1,963,795,000
	- Kab. Tulang Bawang	Rp -	Rp 1,342,496,000
	- Kab. Tanggamus	Rp -	Rp 1,689,141,000
	- Kab. Lampung Timur	Rp -	Rp 2,256,217,000
	- Kab. Way Kanan	Rp -	Rp 1,377,772,000
	- Kab. Pesawaran	Rp -	Rp 1,330,524,000
	- Kab. Pringsewu	Rp -	Rp 1,236,629,000
	- Kab. Mesuji	Rp -	Rp 1,033,600,000
	- Kab. Tulang Bawang Barat	Rp -	Rp 1,019,224,000
	- Kab. Pesisir Barat	Rp -	Rp 1,748,347,000
	- Kota Bandar Lampung	Rp -	Rp 2,116,069,000
	- Kota Metro	Rp -	Rp 793,951,000
11.	PROVINSI BANTEN	Rp 600,000,000	Rp 17,851,538,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Serang	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Serang	Rp -	Rp 2,563,092,000
	- Kab. Pandeglang	Rp -	Rp 2,460,674,000
	- Kab. Lebak	Rp -	Rp 2,262,253,000
	- Kab. Tangerang	Rp -	Rp 3,678,500,000
	- Kota Tangerang	Rp -	Rp 2,259,282,000
	- Kota Cilegon	Rp -	Rp 1,056,171,000
	- Kota Serang	Rp -	Rp 1,144,775,000
	- Kota Tangerang Selatan	Rp -	Rp 1,826,791,000
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp -	Rp 21,157,740,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kota Jakarta Pusat	Rp -	Rp 2,992,181,000
	- Kota Jakarta Utara	Rp -	Rp 3,100,945,000
	- Kota Jakarta Barat	Rp -	Rp 4,352,199,000
	- Kota Jakarta Selatan	Rp -	Rp 4,525,075,000
	- Kota Jakarta Timur	Rp -	Rp 5,259,885,000
	- Kabupaten Kepulauan Seribu	Rp -	Rp 927,455,000
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp 6,645,000,000	Rp 78,074,194,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,580,000,000	Rp 1,580,000,000
	- Kab. Cianjur	Rp 950,000,000	Rp 950,000,000
	- Kab. Cirebon	Rp 630,000,000	Rp 630,000,000
	- Kab. Indramayu	Rp 760,000,000	Rp 760,000,000
	- Kab. Bandung	Rp 325,000,000	Rp 325,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Kuningan	Rp -	Rp 2,388,511,000
	- Kab. Cianjur	Rp -	Rp 3,522,837,000
	- Kab. Cirebon	Rp -	Rp 3,539,070,000
	- Kab. Indramayu	Rp -	Rp 3,107,245,000
	- Kab. Bandung	Rp -	Rp 4,741,733,000
	- Kab. Bogor	Rp -	Rp 5,282,071,000
	- Kab. Sukabumi	Rp -	Rp 4,090,936,000
	- Kab. Bekasi	Rp -	Rp 3,523,007,000
	- Kab. Karawang	Rp -	Rp 3,108,897,000
	- Kab. Purwakarta	Rp -	Rp 1,732,895,000
	- Kab. Subang	Rp -	Rp 2,796,155,000
	- Kab. Sumedang	Rp -	Rp 2,226,916,000
	- Kab. Garut	Rp -	Rp 3,712,558,000
	- Kab. Tasikmalaya	Rp -	Rp 3,100,951,000
	- Kab. Ciamis	Rp -	Rp 2,355,718,000
	- Kab. Majalengka	Rp -	Rp 2,393,925,000
	- Kab. Bandung Barat	Rp -	Rp 2,431,599,000
	- Kab. Pangandaran	Rp -	Rp 1,949,806,000
	- Kota Bandung	Rp -	Rp 3,525,272,000
	- Kota Bogor	Rp -	Rp 1,555,046,000
	- Kota Sukabumi	Rp -	Rp 925,159,000
	- Kota Cirebon	Rp -	Rp 884,329,000
	- Kota Bekasi	Rp -	Rp 3,067,885,000
	- Kota Depok	Rp -	Rp 2,301,593,000
	- Kota Tasikmalaya	Rp -	Rp 1,348,446,000
	- Kota Cimahi	Rp -	Rp 1,052,620,000
	- Kota Banjar	Rp -	Rp 764,014,000
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 9,155,000,000	Rp 78,481,912,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Cilacap	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Banjarnegara	Rp -	Rp 1,400,000,000
	- Kab. Purworejo	Rp -	Rp 1,400,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Cilacap	Rp 435,000,000	Rp 435,000,000
	- Kab. Brebes	Rp 885,000,000	Rp 885,000,000
	- Kab. Pemalang	Rp 780,000,000	Rp 780,000,000
	- Kab. Kendal	Rp 680,000,000	Rp 680,000,000
	- Kota Semarang	Rp 995,000,000	Rp 995,000,000
	- Kab. Semarang	Rp 580,000,000	Rp 580,000,000
	- Kab. Magelang	Rp 215,000,000	Rp 215,000,000
	- Kab. Sragen	Rp 530,000,000	Rp 530,000,000
	- Kab. Boyolali	Rp 535,000,000	Rp 535,000,000
	- Kab. Grobogan	Rp 520,000,000	Rp 520,000,000
	- Kab. Karanganyar	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Sragen	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Cilacap	Rp -	Rp 2,898,032,000
	- Kab. Brebes	Rp -	Rp 2,771,543,000
	- Kab. Pemalang	Rp -	Rp 2,312,862,000
	- Kab. Kendal	Rp -	Rp 1,953,552,000
	- Kota Semarang	Rp -	Rp 2,396,847,000
	- Kab. Semarang	Rp -	Rp 1,932,586,000
	- Kab. Magelang	Rp -	Rp 2,288,033,000
	- Kab. Sragen	Rp -	Rp 1,953,980,000
	- Kab. Boyolali	Rp -	Rp 1,950,514,000
	- Kab. Grobogan	Rp -	Rp 2,383,754,000
	- Kab. Karanganyar	Rp -	Rp 1,789,454,000
	- Kab. Demak	Rp -	Rp 1,956,208,000
	- Kab. Pekalongan	Rp -	Rp 1,889,674,000
	- Kab. Batang	Rp -	Rp 1,643,754,000
	- Kab. Tegal	Rp -	Rp 2,333,774,000
	- Kota Tegal	Rp -	Rp 851,169,000
	- Kab. Pati	Rp -	Rp 2,282,269,000
	- Kab. Kudus	Rp -	Rp 1,533,403,000
	- Kab. Jepara	Rp -	Rp 2,044,539,000
	- Kab. Rembang	Rp -	Rp 1,471,930,000
	- Kab. Blora	Rp -	Rp 1,775,851,000
	- Kab. Banyumas	Rp -	Rp 2,878,986,000
	- Kab. Purbalingga	Rp -	Rp 1,882,683,000
	- Kab. Banjarnegara	Rp -	Rp 1,980,666,000
	- Kab. Temanggung	Rp -	Rp 1,756,113,000
	- Kab. Wonosobo	Rp -	Rp 1,728,620,000
	- Kab. Purworejo	Rp -	Rp 1,652,426,000
	- Kab. Kebumen	Rp -	Rp 2,490,867,000
	- Kab. Klaten	Rp -	Rp 2,415,681,000
	- Kab. Sukoharjo	Rp -	Rp 1,693,666,000
	- Kab. Wonogiri	Rp -	Rp 2,162,810,000
	- Kota Salatiga	Rp -	Rp 755,946,000
	- Kota Pekalongan	Rp -	Rp 873,687,000
	- Kota Magelang	Rp -	Rp 682,452,000
	- Kota Surakarta	Rp -	Rp 1,158,581,000
15	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	Rp 2,415,000,000	Rp 10,372,708,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Sleman	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Kulon Progo	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
	- Kab. Bantul	Rp 765,000,000	Rp 765,000,000
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 850,000,000	Rp 850,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Sleman	Rp -	Rp 1,975,413,000
	- Kab. Kulon Progo	Rp -	Rp 1,214,736,000
	- Kab. Bantul	Rp -	Rp 1,865,748,000
	- Kab. Gunung Kidul	Rp -	Rp 1,705,061,000
	- Kota Yogyakarta	Rp -	Rp 1,196,750,000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 6,625,000,000	Rp 81,849,691,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Tuban	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Bangkalan	Rp 215,000,000	Rp 215,000,000
	- Kab. Bondowoso	Rp 515,000,000	Rp 515,000,000
	- Kab. Probolinggo	Rp 420,000,000	Rp 420,000,000
	- Kab. Blitar	Rp 490,000,000	Rp 490,000,000
	- Kab. Jember	Rp 437,000,000	Rp 437,000,000
	- Kab. Ngawi	Rp 348,000,000	Rp 348,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Probolinggo	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
	- Kab. Situbondo	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	- Kab. Malang	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	- Kab. Pacitan	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Tuban	Rp -	Rp 2,176,497,000
	- Kab. Bangkalan	Rp -	Rp 2,026,159,000
	- Kab. Bondowoso	Rp -	Rp 1,847,383,000
	- Kab. Probolinggo	Rp -	Rp 2,188,161,000
	- Kab. Blitar	Rp -	Rp 2,247,767,000
	- Kab. Jember	Rp -	Rp 3,870,980,000
	- Kab. Ngawi	Rp -	Rp 1,843,597,000
	- Kab. Situbondo	Rp -	Rp 1,613,369,000
	- Kab. Malang	Rp -	Rp 3,766,620,000
	- Kab. Pacitan	Rp -	Rp 1,394,097,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Gresik	Rp -	Rp 2,201,348,000
	- Kab. Mojokerto	Rp -	Rp 2,049,524,000
	- Kab. Sidoarjo	Rp -	Rp 2,784,325,000
	- Kab. Jombang	Rp -	Rp 2,363,694,000
	- Kab. Sampang	Rp -	Rp 1,698,213,000
	- Kab. Pamekasan	Rp -	Rp 1,634,333,000
	- Kab. Sumenep	Rp -	Rp 2,246,944,000
	- Kab. Banyuwangi	Rp -	Rp 2,770,573,000
	- Kab. Pasuruan	Rp -	Rp 2,675,989,000
	- Kab. Lumajang	Rp -	Rp 2,136,937,000
	- Kab. Kediri	Rp -	Rp 2,611,462,000
	- Kab. Tulungagung	Rp -	Rp 2,064,779,000
	- Kab. Nganjuk	Rp -	Rp 2,015,758,000
	- Kab. Trenggalek	Rp -	Rp 1,586,907,000
	- Kab. Madiun	Rp -	Rp 1,608,130,000
	- Kab. Magetan	Rp -	Rp 1,648,277,000
	- Kab. Ponorogo	Rp -	Rp 1,951,438,000
	- Kab. Bojonegoro	Rp -	Rp 2,513,190,000
	- Kab. Lamongan	Rp -	Rp 2,535,785,000
	- Kota Surabaya	Rp -	Rp 4,163,702,000
	- Kota Mojokerto	Rp -	Rp 692,934,000
	- Kota Malang	Rp -	Rp 1,454,090,000
	- Kota Pasuruan	Rp -	Rp 811,717,000
	- Kota Probolinggo	Rp -	Rp 862,979,000
	- Kota Blitar	Rp -	Rp 733,554,000
	- Kota Kediri	Rp -	Rp 864,542,000
	- Kota Madiun	Rp -	Rp 783,854,000
	- Kota Batu	Rp -	Rp 785,083,000
17.	PROVINSI BALI	Rp 350,000,000	Rp 11,270,859,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Karangasem	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Karangasem	Rp -	Rp 1,198,782,000
	- Kab. Buleleng	Rp -	Rp 1,610,976,000
	- Kab. Jembrana	Rp -	Rp 1,067,265,000
	- Kab. Klungkung	Rp -	Rp 937,075,000
	- Kab. Gianyar	Rp -	Rp 1,295,857,000
	- Kab. Bangli	Rp -	Rp 986,493,000
	- Kab. Badung	Rp -	Rp 1,246,141,000
	- Kab. Tabanan	Rp -	Rp 1,345,956,000
	- Kota Denpasar	Rp -	Rp 1,232,314,000
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 6,090,000,000	Rp 23,697,743,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Sambas	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Bengkayang	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp 2,200,000,000	Rp 2,200,000,000
	- Kab. Sanggau	Rp 890,000,000	Rp 890,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Sambas	Rp -	Rp 1,683,222,000
	- Kab. Bengkayang	Rp -	Rp 1,233,998,000
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp -	Rp 1,337,713,000
	- Kab. Sanggau	Rp -	Rp 1,389,483,000
	- Kab. Sintang	Rp -	Rp 1,289,959,000
	- Kab. Mempawah	Rp -	Rp 1,107,631,000
	- Kab. Ketapang	Rp -	Rp 1,630,032,000
	- Kab. Landak	Rp -	Rp 1,302,188,000
	- Kab. Melawi	Rp -	Rp 1,086,117,000
	- Kab. Sekadau	Rp -	Rp 961,294,000
	- Kab. Kayong Utara	Rp -	Rp 951,479,000
	- Kab. Kubu Raya	Rp -	Rp 1,412,567,000
	- Kota Pontianak	Rp -	Rp 1,331,414,000
	- Kota Singkawang	Rp -	Rp 890,646,000
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp -	Rp 15,253,515,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Kotawaringin Barat	Rp -	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Kapuas	Rp -	Rp 1,411,112,000
	- Kab. Barito Utara	Rp -	Rp 956,358,000
	- Kab. Barito Selatan	Rp -	Rp 808,631,000
	- Kab. Kotawaringin Timur	Rp -	Rp 1,360,576,000
	- Kab. Kotawaringin Barat	Rp -	Rp 927,462,000
	- Kab. Katingan	Rp -	Rp 1,051,014,000
	- Kab. Seruyan	Rp -	Rp 967,263,000
	- Kab. Sukamara	Rp -	Rp 760,809,000
	- Kab. Lamandau	Rp -	Rp 850,739,000
	- Kab. Gunung Mas	Rp -	Rp 1,018,205,000
	- Kab. Pulang Pisau	Rp -	Rp 902,825,000
	- Kab. Murung Raya	Rp -	Rp 931,576,000
	- Kab. Barito Timur	Rp -	Rp 935,929,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kota Palangkaraya	Rp -	Rp 871,016,000
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 1,400,000,000	Rp 16,344,205,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Tanah Bumbu	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Tanah Bumbu	Rp -	Rp 1,140,917,000
	- Kab. Banjar	Rp -	Rp 1,579,357,000
	- Kab. Tanah Laut	Rp -	Rp 1,151,089,000
	- Kab. Tapin	Rp -	Rp 1,054,293,000
	- Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp -	Rp 1,065,455,000
	- Kab. Hulu Sungai Tengah	Rp -	Rp 1,063,105,000
	- Kab. Barito Kuala	Rp -	Rp 1,306,982,000
	- Kab. Tabalong	Rp -	Rp 1,070,649,000
	- Kab. Kotabaru	Rp -	Rp 1,374,341,000
	- Kab. Hulu Sungai Utara	Rp -	Rp 1,053,977,000
	- Kab. Balangan	Rp -	Rp 903,213,000
	- Kota Banjarmasin	Rp -	Rp 1,273,046,000
	- Kota Banjar Baru	Rp -	Rp 907,781,000
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp -	Rp 13,342,017,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Paser	Rp -	Rp 1,158,682,000
	- Kab. Berau	Rp -	Rp 1,125,835,000
	- Kab. Kutai Barat	Rp -	Rp 1,325,315,000
	- Kab. Kutai Timur	Rp -	Rp 1,582,462,000
	- Kab. Penajam Paser Utara	Rp -	Rp 920,007,000
	- Kab. Kutai Kertanegera	Rp -	Rp 1,774,937,000
	- Kab. Mahakam Ulu	Rp -	Rp 1,689,919,000
	- Kota Samarinda	Rp -	Rp 1,515,175,000
	- Kota Balikpapan	Rp -	Rp 1,351,658,000
	- Kota Bontang	Rp -	Rp 898,027,000
22.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 4,200,000,000	Rp 19,746,209,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Bitung	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau		
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp -	Rp 1,165,932,000
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp -	Rp 1,112,702,000
	- Kota Bitung	Rp -	Rp 980,457,000
	- Kab. Minahasa	Rp -	Rp 1,546,122,000
	- Kab. Bolaang Mongondo	Rp -	Rp 1,221,055,000
	- Kab. Minahasa Selatan	Rp -	Rp 1,249,372,000
	- Kab. Minahasa Tenggara	Rp -	Rp 1,015,997,000
	- Kab. Minahasa Utara	Rp -	Rp 1,067,159,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Utara	Rp -	Rp 836,346,000
	- Kab. Sitaro	Rp -	Rp 882,087,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Selatan	Rp -	Rp 793,070,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Timur	Rp -	Rp 810,100,000
	- Kota Manado	Rp -	Rp 1,255,097,000
	- Kota Tomohon	Rp -	Rp 824,137,000
	- Kota Mobago	Rp -	Rp 786,576,000
23.	PROVINSI GORONTALO	Rp 1,480,000,000	Rp 8,042,985,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Boalemo	Rp 535,000,000	Rp 535,000,000
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
	- Kab. Gorontalo	Rp 265,000,000	Rp 265,000,000
	- Kab. Bone Bolango	Rp 330,000,000	Rp 330,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Boalemo	Rp -	Rp 925,523,000
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp -	Rp 1,009,371,000
	- Kab. Gorontalo	Rp -	Rp 1,471,249,000
	- Kab. Bone Bolango	Rp -	Rp 1,212,703,000
	- Kab. Pohuwato	Rp -	Rp 1,026,555,000
	- Kota Gorontalo	Rp -	Rp 917,584,000
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 3,435,000,000	Rp 19,811,496,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Morowali	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	- Kab. Sigi	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Donggala	Rp 635,000,000	Rp 635,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Morowali	Rp -	Rp 959,089,000
	- Kab. Sigi	Rp -	Rp 1,229,711,000
	- Kab. Donggala	Rp -	Rp 1,300,832,000
	- Kab. Poso	Rp -	Rp 1,278,191,000
	- Kab. Toli-Toli	Rp -	Rp 1,031,745,000
	- Kab. Banggai	Rp -	Rp 1,498,874,000
	- Kab. Buol	Rp -	Rp 1,016,106,000
	- Kab. Banggai Kepulauan	Rp -	Rp 1,031,328,000
	- Kab. Parimo	Rp -	Rp 1,626,000,000
	- Kab. Tojo Una-Una	Rp -	Rp 987,784,000
	- Kab. Banggai Laut	Rp -	Rp 1,623,961,000
	- Kab. Morowali Utara	Rp -	Rp 1,716,765,000
	- Kota Palu	Rp -	Rp 1,076,110,000
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 2,355,000,000	Rp 9,889,861,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Polewali Mandar	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Majene	Rp 1,055,000,000	Rp 1,055,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Polewali Mandar	Rp -	Rp 1,532,214,000
	- Kab. Majene	Rp -	Rp 934,088,000
	- Kab. Mamuju	Rp -	Rp 1,046,307,000
	- Kab. Mamuju Utara	Rp -	Rp 1,123,255,000
	- Kab. Mamasa	Rp -	Rp 1,242,681,000
	- Kab. Mamuju Tengah	Rp -	Rp 1,656,316,000
26.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 1,710,000,000	Rp 24,720,459,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kota Kendari	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Buton	Rp -	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Muna	Rp 610,000,000	Rp 610,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Muna	Rp -	Rp 1,324,095,000
	- Kota Kendari	Rp -	Rp 1,086,791,000
	- Kab. Buton	Rp -	Rp 883,427,000
	- Kab. Kolaka	Rp -	Rp 1,066,957,000
	- Kab. Konawe Selatan	Rp -	Rp 1,447,231,000
	- Kab. Bombana	Rp -	Rp 1,273,125,000
	- Kab. Wakatobi	Rp -	Rp 905,454,000
	- Kab. Kolaka Utara	Rp -	Rp 1,103,868,000
	- Kab. Konawe	Rp -	Rp 1,417,415,000
	- Kab. Konawe Utara	Rp -	Rp 911,934,000
	- Kab. Buton Utara	Rp -	Rp 808,452,000
	- Kab. Kolaka Timur	Rp -	Rp 1,769,765,000
	- Kab. Konawe Kepulauan	Rp -	Rp 1,581,313,000
	- Kota Bau-Bau	Rp -	Rp 907,130,000
	- Kab. Muna Barat	Rp -	Rp 1,721,258,000
	- Kab. Buton Selatan	Rp -	Rp 1,641,008,000
	- Kab. Buton Tengah	Rp -	Rp 1,661,236,000
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp 8,235,000,000	Rp 40,782,242,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Luwu Utara	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Wajo	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Maros	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Bantaeng	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kota Palopo	Rp -	Rp 1,200,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Maros	Rp 950,000,000	Rp 950,000,000
	- Kab. Pinrang	Rp 620,000,000	Rp 620,000,000
	- Kab. Bone	Rp 615,000,000	Rp 615,000,000
	- Kab. Bulukumba	Rp 750,000,000	Rp 750,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Bantaeng	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Luwu Utara	Rp -	Rp 1,266,343,000
	- Kab. Wajo	Rp -	Rp 1,440,837,000
	- Kab. Maros	Rp -	Rp 1,355,888,000
	- Kab. Pinrang	Rp -	Rp 1,318,610,000
	- Kab. Bone	Rp -	Rp 2,105,955,000
	- Kab. Bulukumba	Rp -	Rp 1,297,243,000
	- Kab. Bantaeng	Rp -	Rp 948,808,000
	- Kab. Gowa	Rp -	Rp 1,808,744,000
	- Kab. Tana Toraja	Rp -	Rp 1,315,454,000
	- Kab. Luwu	Rp -	Rp 1,531,733,000
	- Kab. Sinjai	Rp -	Rp 1,043,669,000
	- Kab. Jeneponto	Rp -	Rp 1,292,164,000
	- Kab. Selayar	Rp -	Rp 1,017,907,000
	- Kab. Takalar	Rp -	Rp 1,115,616,000
	- Kab. Barru	Rp -	Rp 946,681,000
	- Kab. Sidenreng Rapang	Rp -	Rp 1,201,490,000
	- Kab. Pangkajene Kepaulauan	Rp -	Rp 1,294,421,000
	- Kab. Soppeng	Rp -	Rp 1,060,957,000
	- Kab. Enrekang	Rp -	Rp 1,145,842,000
	- Kab. Luwu Timur	Rp -	Rp 1,175,217,000
	- Kab. Toraja Utara	Rp -	Rp 1,365,299,000
	- Kota Makassar	Rp -	Rp 2,508,631,000
	- Kota Pare-Pare	Rp -	Rp 830,524,000
	- Kota Palopo	Rp -	Rp 959,209,000
28.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 1,400,000,000	Rp 15,101,047,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Bima	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Bima	Rp -	Rp 1,565,695,000
	- Kab. Lombok Barat	Rp -	Rp 1,555,942,000
	- Kab. Lombok Tengah	Rp -	Rp 1,925,127,000
	- Kab. Lombok Timur	Rp -	Rp 2,340,095,000
	- Kab. Sumbawa	Rp -	Rp 1,608,620,000
	- Kab. Dompu	Rp -	Rp 996,401,000
	- Kab. Sumbawa Barat	Rp -	Rp 917,487,000
	- Kab. Lombok Utara	Rp -	Rp 935,051,000
	- Kota Mataram	Rp -	Rp 1,056,557,000
	- Kota Bima	Rp -	Rp 800,072,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 6,910,000,000	Rp 34,869,023,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Prov. Nusa Tenggara Timur	Rp 210,000,000	Rp -
	- Kab. Kupang	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	- Kab. Malaka	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Alor	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Belu	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
	- Kab. Kupang	Rp -	Rp 1,609,235,000
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp -	Rp 1,460,242,000
	- Kab. Malaka	Rp -	Rp 1,871,999,000
	- Kab. Alor	Rp -	Rp 1,448,957,000
	- Kab. Belu	Rp -	Rp 1,123,399,000
	- Kab. Timor Tengah Selatan	Rp -	Rp 1,715,256,000
	- Kab. Sika	Rp -	Rp 1,468,902,000
	- Kab. Flores Timur	Rp -	Rp 1,364,645,000
	- Kab. Ende	Rp -	Rp 1,404,582,000
	- Kab. Ngada	Rp -	Rp 1,285,166,000
	- Kab. Manggarai	Rp -	Rp 1,242,952,000
	- Kab. Sumba Timur	Rp -	Rp 1,403,475,000
	- Kab. Sumba Barat	Rp -	Rp 985,852,000
	- Kab. Lembata	Rp -	Rp 1,228,549,000
	- Kab. Rotendao	Rp -	Rp 1,047,691,000
	- Kab. Manggarai Barat	Rp -	Rp 1,191,346,000
	- Kab. Nageko	Rp -	Rp 944,409,000
	- Kab. Sumba Tengah	Rp -	Rp 901,268,000
	- Kab. Sumba Barat Daya	Rp -	Rp 1,284,798,000
	- Kab. Manggarai Timur	Rp -	Rp 1,162,941,000
	- Kab. Sabu Raijua	Rp -	Rp 918,603,000
	- Kota Kupang	Rp -	Rp 1,104,756,000
30.	PROVINSI MALUKU	Rp 1,000,000,000	Rp 15,191,296,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp -	Rp 1,184,213,000
	- Kab. Maluku Tengah	Rp -	Rp 1,780,482,000
	- Kab. Maluku Tenggara	Rp -	Rp 1,294,104,000
	- Kab. Buru	Rp -	Rp 1,264,352,000
	- Kab. Kepulauan Aru	Rp -	Rp 1,237,544,000
	- Kab. Seram Bagian Barat	Rp -	Rp 1,375,019,000
	- Kab. Seram Bagian Timur	Rp -	Rp 1,445,642,000
	- Kab. Maluku Barat Daya	Rp -	Rp 1,448,744,000
	- Kab. Buru Selatan	Rp -	Rp 1,062,166,000
	- Kota Ambon	Rp -	Rp 1,140,872,000
	- Kota Tual	Rp -	Rp 958,158,000
31.	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp -	Rp 13,233,165,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Halmahera Tengah	Rp -	Rp 1,070,829,000
	- Kab. Halmahera Utara	Rp -	Rp 1,481,600,000
	- Kab. Halmahera Selatan	Rp -	Rp 2,092,012,000
	- Kab. Kepulauan Sula	Rp -	Rp 1,307,310,000
	- Kab. Halmahera Timur	Rp -	Rp 1,174,169,000
	- Kab. Halmahera Barat	Rp -	Rp 1,154,352,000
	- Kab. Pulau Morotai	Rp -	Rp 966,938,000
	- Kab. Pulau Taliabu	Rp -	Rp 1,830,996,000
	- Kota Ternate	Rp -	Rp 1,029,782,000
	- Kota Tidore Kepulauan	Rp -	Rp 1,125,177,000
32.	PROVINSI PAPUA	Rp 8,520,000,000	Rp 63,906,406,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Lanny Jaya	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	- Kab. Nabire	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000
	- Kota Jayapura	Rp -	Rp 2,000,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Prov. Papua	Rp 1,500,000,000	Rp 764,700,000
	- Kab. Merauke	Rp 1,350,000,000	Rp 1,350,000,000
	- Kota Jayapura	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Merauke	Rp 870,000,000	Rp 870,000,000

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Merauke	Rp 900,000,000	Rp 900,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Lanny Jaya	Rp -	Rp 2,753,658,000
	- Kab. Merauke	Rp -	Rp 1,829,567,000
	- Kab. Nabire	Rp -	Rp 1,679,348,000
	- Kota Jayapura	Rp -	Rp 1,216,690,000
	- Kab. Jayapura	Rp -	Rp 1,782,245,000
	- Kab. Biak Numfor	Rp -	Rp 1,779,213,000
	- Kab. Yapen Waropen	Rp -	Rp 1,556,149,000
	- Kab. Jayawijaya	Rp -	Rp 2,843,388,000
	- Kab. Paniai	Rp -	Rp 1,676,008,000
	- Kab. Puncak Jaya	Rp -	Rp 2,370,033,000
	- Kab. Mimika	Rp -	Rp 1,823,935,000
	- Kab. Mappi	Rp -	Rp 1,745,116,000
	- Kab. Asmat	Rp -	Rp 1,799,948,000
	- Kab. Boven Digul	Rp -	Rp 1,921,529,000
	- Kab. Sarmi	Rp -	Rp 1,356,853,000
	- Kab. Keerom	Rp -	Rp 1,199,744,000
	- Kab. Tolikara	Rp -	Rp 3,322,613,000
	- Kab. Pegunungan Bintang	Rp -	Rp 2,580,089,000
	- Kab. Mamberamo Raya	Rp -	Rp 1,505,262,000
	- Kab. Waropen	Rp -	Rp 1,524,353,000
	- Kab. Yakuhimo	Rp -	Rp 3,618,692,000
	- Kab. Supiori	Rp -	Rp 1,139,835,000
	- Kab. Mamberamo Tengah	Rp -	Rp 1,183,984,000
	- Kab. Dogiyai	Rp -	Rp 1,697,029,000
	- Kab. Yalimo	Rp -	Rp 1,184,210,000
	- Kab. Nduga	Rp -	Rp 2,462,170,000
	- Kab. Puncak	Rp -	Rp 1,645,679,000
	- Kab. Deiyai	Rp -	Rp 1,384,457,000
	- Kab. Intan Jaya	Rp -	Rp 1,539,909,000
33.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 2,500,000,000	Rp 25,790,106,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

www.peraturan.go.id

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
	- Kab. Raja Ampat	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Raja Ampat	Rp -	Rp 2,077,440,000
	- Kab. Manokwari	Rp -	Rp 1,178,237,000
	- Kab. Sorong	Rp -	Rp 1,764,841,000
	- Kab. Fakfak	Rp -	Rp 1,679,423,000
	- Kab. Sorong Selatan	Rp -	Rp 1,599,005,000
	- Kab. Teluk Bintuni	Rp -	Rp 2,068,218,000
	- Kab. Teluk Wondama	Rp -	Rp 1,559,550,000
	- Kab. Kaimana	Rp -	Rp 1,367,553,000
	- Kab. Tambrauw	Rp -	Rp 2,328,378,000
	- Kab. Maybrat	Rp -	Rp 2,114,176,000
	- Kab. Pegunungan Arfak	Rp -	Rp 2,218,022,000
	- Kab. Manokwari Selatan	Rp -	Rp 1,833,685,000
	- Kota Sorong	Rp -	Rp 1,501,578,000
34.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 1,500,000,000	Rp 6,568,857,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Nunukan	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota		
	- Kab. Nunukan	Rp -	Rp 1,222,686,000
	- Kab. Bulungan	Rp -	Rp 954,759,000
	- Kab. Malinau	Rp -	Rp 1,157,212,000
	- Kab. Tanah Tidung	Rp -	Rp 822,247,000
	- Kota Tarakan	Rp -	Rp 911,953,000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

www.peraturan.go.id